



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER**

**RAPAT PARIPURNA  
PENYAMPAIAN REKOMENDASI DARI BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN PASER TERHADAP HASIL PEMBAHASAN  
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**Yang Terhormat : Wakil Bupati Paser, H. Kaharuddin, SE**

**Yang Kami Hormati : Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot**

**Yang Kami Hormati : Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot**

**Yang Kami Hormati : Kapolres Paser**

**Yang Kami Hormati : Dandim 0904 Tanah Grogot**

**Yang Kami Hormati : Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot**

**Yang Kami Hormati : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, dan  
Sekretaris DPRD Kabupaten Paser**

**Yang Kami Hormati : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser**

**Yang Kami Hormati : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser**

**Yang Kami Hormati : Para Staf Ahli Sekretariat Daerah kabupaten Paser**

**Yang Kami Hormati : Kepala Organisasi Perangkat daerah dan Seluruh  
Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser**

**Yang Kami Hormati : Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan,  
Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat,  
Pemuka Agama, serta Hadirin Yang Berbahagia**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa' Taala atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, walaupun masih dalam keadaan wabah COVID-19, kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019, dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sebelum kami menyampaikan rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019, izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan segenap Perangkat Daerah, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan para Auditor BPK-RI, sehubungan dengan Pemerintah Kabupaten Paser kembali mendapatkan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) yang ke 7 (tujuh) kalinya secara berturut-turut.

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser dan seluruh jajarannya sudah sangat luar biasa tekad, komitmen, dan kerja kerasnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan hal ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser telah bersama-sama saling membantu dan mengingatkan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan segala kekurangan agar bisa mencapai hasil yang lebih baik. Semoga kedepannya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan kita bersama.

Tahapan demi tahapan setelah tahun anggaran 2019 berakhir, telah dijalankan tepat waktu oleh Bupati Paser beserta jajarannya antara lain penyampaian LKPj Bupati, penyampaian Rekomendasi LKPj Bupati Paser TA. 2019 oleh DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 23 April 2020, serta penyampaian LHP BPK-RI atas laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Paser pada tanggal 23 Juni 2020. Dan kini saatnya memproses/ membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019, sehingga tidak terlalu sulit untuk disepakati menjadi PERDA. Namun demikian DPRD Kabupaten Paser melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser ingin menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Badan Anggaran dapat memahami dan menerima terkait realisasi dari pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019. Dimana realisasi pendapatan sebesar 105,04% (*seratus lima koma nol empat persen*), ini merupakan prestasi yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar 88,87% (*delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen*), hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah di waktu-waktu mendatang, agar realisasi belanja dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Kabupaten Paser.
2. Selanjutnya terhadap SILPA pada pelaksanaan APBD 2019 sebesar Rp.442,373 Miliar (*empat ratus empat puluh dua milyar lebih*), yang telah diperhitungkan untuk menutup kekurangan APBD Kabupaten Paser TA. 2020, maka Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan penggunaan SILPA untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dari dampak pandemi COVID-19, sehingga nantinya diharapkan tambahan anggaran ini tidak menjadi SILPA kembali.
3. Terkait adanya temuan dari BPK-RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari BPK-RI dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian kita bersama, dan selanjutnya DPRD Kabupaten Paser akan melakukan pemantauan secara berkala terkait tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi dari BPK-RI. Adapun OPD yang terkait dalam temuan BPK-RI adalah Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Panglima Sebaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPTD Kompleks Perkantoran, UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Materi, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTD Terminal Kuaro, dan UPTD Kandilo Plaza.
4. Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat Kabupaten Paser dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam

bentuk apapun, khususnya pengawasan dan pendampingan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

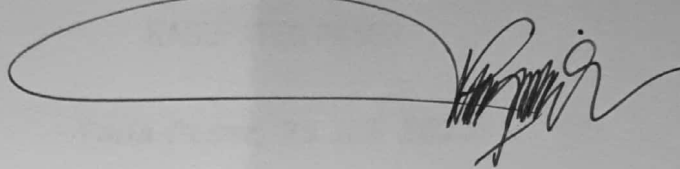
5. Saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser dalam Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019 agar dapat diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
6. Tingginya Tingkat Pengangguran sebesar 4,55% (*empat koma lima puluh lima persen*) dan tingkat kemiskinan sebesar 8,95% (*delapan koma Sembilan puluh lima persen*) pada Tahun 2019 di Kabupaten Paser, menunjukkan bahwa minimnya akses pekerjaan menjadi satu problem kerentanan masyarakat untuk masuk dalam zona kemiskinan, oleh karenanya Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Paser membangun akses di bidang ketenagakerjaan yang mampu menampung tenaga kerja dari masyarakat lokal dan lebih meningkatkan lagi pembangunan di bidang perekonomian.
7. Pemerintah Kabupaten Paser diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari Perusahaan Daerah, dan badan usaha milik daerah lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan, dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan efektif, dimana pengalokasian sumberdaya harus tercatat dan terukur ke dalam suatu dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal ini merupakan bagian dari perwujudan tugas pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab
9. Terkait keadaan darurat kesehatan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19, dan adanya kebijakan pusat terkait penerapan *New Normal* atau tatanan kehidupan normal baru dan aman COVID-19 di Kabupaten Paser, maka DPRD Kabupaten Paser menyampaikan agar dalam hal ini perlu dicari solusi terbaik yang benar-benar dapat mengantisipasi penularan melalui transmisi lokal dan kemungkinan masuknya kasus baru ke Kabupaten Paser, oleh sebab itu diminta kepada Gugus Tugas COVID-19 di Kecamatan agar lebih aktif lagi dalam mengantisipasi kondisi ini.

Demikian penyampaian rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019, semoga Allah Subhanahu Wa' Taala, senantiasa memberikan petunjuk dan Ridho-Nya kepada kita dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Paser, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan terima kasih kepada seluruh hadirin.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Tana Paser, 23 Juli 2020,  
Ketua Badan Anggaran DPRD Kab. Paser,



**(HENDRA WAHYUDI. ST)**